Mana Yang Lebih Baik Atut Atau Rano?

Tim Penyusun
Ucu Nur Arief Jauhar
Ibnoe Rachman
Hasbulloh
Mathori

diterbitkan: www.g15.co.id

Mana Yang Lebih Baik Atut Atau Rano

Tim Penyusun
Ucu Nur Arief Jauhar
Ibnoe Rachman
Hasbulloh
Mathori

www.g15.co.id

Daftar Isi

Pada Mulanya

Sebelum anda bertanya lebih jauh, sebaiknya kami jawab lebih dahulu. Ya, betul. Buku ini memang politis. Ya, betul. Buku ini memang membela Ratu Atut Chosiyah. Ya, betul. Buku ini untuk membantah tudingan pendukung pasangan calon (paslon) No 2, RK – Mulya.

Memasuki tahun 2016, anak Gubernur Banten Atut Chosiyah, yaitu Andika Hazrumy memastikan diri ikut maju diajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017.

Tanggal 4 Maret 2016, Ketua Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDIP) Kabupaten Serang Ida Rosida Lutfi menyatakan, Andika Hazrumy telah mengambil formulir pendaftaran penjaringan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

Dan 9 Maret 2016, Andika Hazrumy yang ditemani istrinya, Adde Rosi Khaerunnisa mengembalikan formulir pendaftaran itu ke kantor DPD PDIP Banten di Cikulur, Kota Serang.

Dari sini, kemudian Andika Hazrumy bersafari hampir ke semua partai yang membuka penjaringan calon gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017. Walau pun Andika belum memastikan diri mengambil posisi calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur.

Di sisi lain, petahana Rano Karno juga dipastikan maju mencalonkan diri kembali menjadi calon Gubernur Banten 2017. Rano hanya daftar penjaringan di partainya, PDIP. Sejak ditahannya Atut Chosiyah oleh KPK karena kasus suap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar pada bulan Desember 2013, hubungan mesra Atut dan Rano menjadi sangat renggang. Jika tidak ingin disebut diam-diam bermusuhan.

Rano Karno adalah Wakil Gubernur saat Atut menjabat Gubernur Banten untuk kedua kalinya. Hubungan mesra saat kampanye dan awal pemerintahannya, seolah lenyap ditelan bumi.

Tak sekali pun Rano Karno menjenguk Atut Chosiyah. Baik selama masa tahanan atau pun setelah divonis hakim. Bahkan berucap simpati atas penahanan Atut Chosiyah, juga tidak pernah diucapkan Rano.

Sikap Rano ini mengundang pernyataan tidak simpati dari keluarga Atut Chosiyah. Menantu Atut, Adde Rosi bahkan menyebut Rano Karno tidak tahu cara menjaga etika.

“Jangan sampai sudah dibuang, ditinggal, ditendang pula,” kata Adde Rosi seperti dilansir beritasatu.com (11/8/2015).

Walau tidak dinyatakan, nuansa permusuhan antara Rano Karno dan keluarga Atut Chosiyah semakin terasa. Isu memberantas kroni-kroni Atut Chosiyah semakin hari semakin menguat.

Kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kelompok

Atut Chosiyah, semakin hari semakin akrab dengan Rano Karno.

Akhirnya permusuhan itu menyeruak ke permukaan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Disclaimer untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2013. Rano tak ingin disalahkan. Rano menuding kepemimpinan Atut yang menyebabkan Dislaimernya APBD Banten.

“Ini kado Plt saya. Tetapi akan saya perbaiki. Tahun depan akan saya tingkatkan opininya. Karena kita sudah tahu dimana kesalahannya,” kata Rano Karno seperti dipublis radaronline.co.id (17/6/2014).

Dengan alasan inilah, Rano mengundang lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Banten. Selain itu, LSM Nasional yang dikenal konsen terhadap pemberantasan korupsi, yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW) juga diundang ke Banten. Niat yang diumumkannya sih baik, yaitu membuat Pemprov Banten menjadi lebih baik.

Maka lengkaplah lambang-lambang permusuhan itu diperlihatkan. ICW adalah LSM yang paling gencar menyerang

Gubernur Banten Atut Chosiyah. Sedangkan KPK adalah lembaga yang menangkap Atut Chosiyah.

Jadi jauh sebelum bel perebutan partai pendukung berbunyi, permusuhan Rano Karno dan keluarga Atut Chosiyah sudah tampak dengan jelas. Keluarga Atut menuntut rasa hormat dari Rano, karena telah membawa Rano ke ranah politik di Banten. Sedangkan Rano sepertinya tak ingin dikaitkan dengan masa kepemimpinan Atut Chosiyah.

***

Setelah Atut ditahan KPK tanggal 20 Desember 2013, otomatis Rano menjadi Plt Gubernur Banten. Lalu kembali menjadi Plt Gubernur Banten setelah vonis Atut mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan baru di bulan Agustus 2015, Rano Karno ditetapkan sebagai Gubernur Banten oleh Mendagri Tjahyo Kumolo.

Isu Rano akan mencalonkan kembali sebagai Gubernur Banten mengalir semakin hari semakin kuat. Pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) Kurdi Martin sangat menguatkan isu pencalonan itu.

Pencopotan Sekda itu diikuti oleh mutasi dan promosi besar-besaran. Mungkin hanya pengamatan subyektif, tapi tak sedikit yang mengatakan, para pejabat yang dikenal akrab dengan Atut Chosiyah atau sering disebut kroninya Atut terlempar dari kursi jabatan yang nyaman. Mutasi ini adalah mutasi persiapan mengakomodir pencalonan kembali Rano Karno.

Selain mutasi ASN/PNS, pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya, Dewan Kesenian Banten (DKB), Dewan Riset Daerah (DRD) dan Dewan Perpustakaan dan kearsipan juga dituding sebagai persiapan mengakomodir tim sukses Rano Karno.

Rano Karno juga mempersiapkan prestasi-prestasi yang akan dibanggakan saat Pilgub nanti. Penghargaan-penghargaan dari berbagai lembaga sudah direncanakan. Hibah-hibah yang

menjadi sorotan di zaman Atut Chosiyah, tetap dipertahankan. Bahkan hibah untuk daerah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal dinaikan cukup signifikan.

Angka-angka indikator pembangunan diusahakan naik. Baik itu IPM, Presentasi Kemiskinan, Pengangguran Terbuka dan Investasi di Banten. Serta indikator-indikator lainnya. Dan tentunya yang harus diperjuangkan mati-matian adalah opini BPK. Jangan sampai mendapatkan opini Disclaimer untuk ketiga kalinya.

Rano Karno berhasil menaikan opini BPK. Dari Disclaimer di tahun 2014 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2015. Uniknya, dari total APBD Banten sebesar Rp7,32 triliun BPK menyatakan Rp6,13 triliun tidak diyakini kebenarannya.

Tapi hal yang paling menyibukkan Rano Karno adalah mengesankan dirinya kesayangan Presiden Jokowi. Selain memamerkan 12 proyek strategis nasional yang ditempatkan di Banten, padahal provinsi lain banyak yang dapat lebih dari 12 proyek, Jokowi pun diundang mondar-mandir ke Banten.

Satu tahun setengah Rano menjabat Gubernur Banten, masyarakat bukannya disuguhi pembangunan, malah disuguhi bolak-baliknya pejabat pemerintah pusat ke Banten. Tjahyo Kumolo, Luhut Binsar Panjaitan dan Jokowi.

***

Harian lokal Radar Banten memasang isu bakal pasangan terkuat di Pilgub Banten 2017 adalah Rano Karno – Andika Hazrumy. Banyak yang mendukung isu ini. Sayangnya, sebagian besar keluarga Atut Chosiyah menampik isu ini.

Atut Chosiyah sendiri jelas sangat menampik isu ini. “Moal jeung eta mah (Tidak sama itu mah),” katanya saat ditemui di jam “bezoek”, pertengahan tahun 2016.

Akhirnya Andika Hazrumy berpasangan dengan Wahidin Halim. Wahidin sebagai calon Gubernur dan Andika sebagai

calon Wakil Gubernur. Pasangan WH-Andika didukung 7 partai dan mendapatkan no urut 1.

Di ujung pendaftaran, akhirnya DPP PDIP mengumumkan pasangan Rano Karno, yaitu Embay Mulya Syarif. Pasangan RK-Mulya ini didukung 3 partai tersisa dan bernomor urut 2.

Dengan gugurnya calon-calon independen, maka Pilgub Banten 2017 hanya diikuti 2 pasangan calon. Menjadi Pilgub Head to Head pertama kalinya. Head to Head yang menyimpan rasa permusuhan dari masa lalu.

***

Sesuai dengan perkiraan banyak orang, gaya kampanye pendukung RK-Mulya akan memanfaatkan kondisi keluarga Andika Hazrumy yang kurang menguntungkan. Ibunya, Atut Chosiyah dan pamannya, Chaeri Wardana sedang mendekam di penjara. Mereka tersandung kasus yang sama, suap terhadap Hakim MK Akil Mochtar.

Selain itu, Chaeri Wardana juga tengah menghadapi sidang

kasus Alkes RSU Balaraja, Tangerang. Penyitaan harta keduanya dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kampanye negatif (black campaign) ini didukung dengan pembentukan Gerakan Masyarakat Anti Dinasti Korup. Gerakan yang deklarasinya dihadiri Ali Soero dan Ali Hanafiah ini, menuding keluarga Atut Chosiyah sebagai penyebab terpuruknya kondisi Provinsi Banten.

Bagi mereka, keluarga Atut Chosiyah adalah sebuah dinasti. Karena anggota keluarga Atut banyak yang menjadi Kepala Daerah di Banten. Walikota Tangerang Airin adalah adik ipar Atut. Bupati Serang Tatu Chasanah adalah adik kandung Atut. Walikota Serang Haerul Jaman adalah adik tiri Atut. Dan Wakil Bupati Pandeglang Tanto WA adalah menantu Atut.

Dinasti buruk rupa bagi mereka. Dinasti yang kerjaannya hanya korupsi saja, tanpa punya prestasi. Dinasti yang menyebabkan kondisi Banten menjadi terpuruk. Maka di Pilgub Banten 2017, mereka menyatakan Banten harus bangkit dari keterpurukan. Dengan cara memberantas dinasti korup yang disematkan pada keluarga Atut Chosiyah.

Sejalan dengan Gerakan Masyarakat Anti Dinasti Korup, dimotori Gol A Gong, pendukung RK-Mulya juga mendorong gerakan Banten Bangkit. Gerakan ini juga menyatakan Provinsi Banten sedang dalam kondisi terpuruk. Sehingga di Pilgub Banten 2017 harus bisa bangkit.

Berbeda dengan Gerakan Anti Dinasti Korup yang berfokus pada memburukan keluarga Atut Chosiyah secara vulgar, gerakan Banten Bangkit lebih berfokus pada keberhasilan Rano Karno dibandingkan Atut Chosiyah.

Selain kedua gerakan ini, pendukung RK-Mulya juga tampak melibatkan LSM ICW. LSM di Jakarta yang gencar menyerang Atut Chosiyah. LSM ICW memang populer sebagai LSM anti korupsi yang berkerjasama dengan KPK.

Tak ketinggalan, RK-Mulya juga tampak sekali berusaha keras mengesankan mereka akrab dengan KPK. Bolak-balik KPK mengadakan acara di Banten. Bahkan pengakuan Rano, KPK sudah berkantor di Pemprov Banten atas undangannya.

Pola kampanye RK-Mulya terlihat jelas. Menyatakan Provinsi Banten dalam keadaan terpuruk. Penyebab terpuruknya Provinsi Banten adalah keluarga Atut Chosiyah (baca: dinasti korup). Anak Atut Chosiyah, Andika Hazrumy mencalonkan diri di Pilgub Banten 2017. Maka opini yang berusaha dibangun oleh pendukung RK-Mulya adalah "jangan pilih anak dari penyebab terpuruknya Provinsi Banten"; jangan pilih Andika, anak Atut Chosiyah penyebab Banten terpuruk.

Porsi terbesar dari kampanye negatif ini dilakukan oleh kelompok Gerakan Masyarakat Anti Dinasti Korup.

Pola kampanye kedua RK-Mulya berusaha bergaya akademisi atau kaum intelektual. Lucunya, mereka tidak menemukan data-data yang mendukung klaim "Provinsi Banten dalam keadaan terpuruk". Pembangunan di Banten ternyata masuk pada kelompok atas perbandingan antar provinsi.

Lalu Banten Bangkit mencoba menggunakan data-data korupsi. Faktanya, kasus korupsi Atut hanya satu. Tepatnya kasus suap Hakim MK. Dalam kasus Alkes RS Balaraja, Chaeri Wardana yang jadi tersangka, bukan Atut. Dugaan TPPU pun masih mengawang di ujung angkasa.

Mereka mau coba menggunakan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Apa lacur, LHP BPK di zaman Rano Karno (2014) malah mendapatkan opini Disclaimer. Sedangkan tahun 2015 hanya mendapatkan WDP. Tak beda dengan Atut Chosiyah.

Akhirnya, niat hati bergaya akademisi dan intelektual, malah jadi para penggosip dan pencinta isu. Berita-berita lama (lebih parah dari basi) dugaan-dugaan korupsi diangkat kembali. Padahal, jangankan jadi tersangka, keterlibatan Atut dalam dugaan korupsi itu saja tidak dijelaskan dalam beritanya.

Mungkin berkaca dari pengalaman ini, kedua gerakan ini dan gerakan pendukung RK-Mulya pada umumnya melakukan pola SBU. Yaitu Summum, Bukmum dan Umyun. Artinya membutakan mata sendiri, menulikan kuping sendiri dan membisukan mulut sendiri.

Bak zombie, mereka mengkampanyekan keberhasilan-keberhasilan RK-Mulya tanpa menyodorkan data-data yang valid dan terverifikasi jelas. Begitu pula mereka memburuk-burukan Atut Chosiyah tanpa data yang valid dan terverifikasi jelas. Bagi mereka, Atut Buruk, Rano berhasil. Tak ada ruang pembuktian. Tak ada ruang verifikasi. Tak ada ruang diskusi.

Terpicu oleh situasi ini, terutama banyaknya klaim keberhasilan Rano dan tudingan ketidak berhasilan Atut

Chosiyah, timbul pertanyaan bagi kami. Betulkah Rano Karno telah berhasil dalam membangun Banten? Betulkah Provinsi Banten dalam keadaan terpuruk? Betulkah Atut tidak berhasil dalam membangun Banten? Betulkah Atut jadi penyebab terpuruknya Provinsi Banten? Betulkah?

Hasilnya, kami tuangkan dalam buku ini. Apakah ini politis? Ya. Tapi buku ini juga berguna untuk mencegah siapa saja yang ingin merubah catatan perjalanan Pemprov Banten untuk kepentingan politik semata.

Penilaian dalam buku ini adalah fakta, karena menggunakan data yang sudah terverifikasi jelas.

Cara Kami Menilai

Ada banyak cara menilai sebuah pemerintahan. Indeks Demokrasi digunakan untuk menilai pemerintah di bidang Demokrasi, termasuk di dalamnya menilai toleransi umat beragama dan perlindungan hak-hak minoritas.

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender digunakan untuk menilai kinerja pemerintah dalam kesetaraan gender. Indeks Gini digunakan untuk menilai kesenjangan. Dan banyak lagi indikator-indikator lainnya.

Lalu bagaimana menilai kinerja sebuah pemerintahan secara utuh?

189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) atau United Nations (UN) berkumpul bulan September 2000. Menyatakan tujuan bersama untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat. Ada 8 tujuan yang disepakati untuk mewujudkan satu tujuan utama; Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan di dunia. Kesepakatan ini disebut Millenium Development Goals (MDGs).

Setiap tahunnya PBB melansir capaian-capaian MDGs. Sayangnya, angka-angka indikator di MDGs itu hanya sampai skala negara. Tidak sampai skala provinsi.

RPJMD Provinsi

Dalam sistem perencanaan di pemerintah Indonesia, dokumen perencanaan dibagi dalam 3 bagian. Yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sedangkan untuk Pemerintah Daerah tinggal menambahkan kata “Daerah” dan nama daerahnya. Misalnya, dokumen RPJP Banten disebut RPJPD Provinsi Banten.

RPJP adalah rencana pembangunan selama 25 tahun ke depan. Hasil evaluasi pembangunan 25 tahun ke belakang dan kondisi kekinian, atau bisa juga hanya hasil kondisi kekinian dijadikan dasar untuk merencanakan keadaan 25 tahun ke depan.

Perencanaan 25 tahun ke depan itu dibagi dalam kelompok waktu 5 tahun-an. Dokumen perencanaan 5 tahunan itu disebut RPJM.

RPJM bukan hanya dokumen yang menjabarkan RPJP dalam rencana 5 tahunan. Tapi juga memuat janji-janji pemimpin saat kampanye. Janji pemimpin berupa Visi dan Misi itu menjadi bagian RPJM yang harus dilaksanakan pemerintah.

RPJM kemudian menjadi sangat penting, karena memasukan target capaian indikator-indikator pembangunan secara pasti setiap tahunnya. Misalkan target capaian Jalan dalam Kondisi Mantap di Provinsi Banten tahun 2015 adalah 92,15%.

Turunan dari RPJM adalah RKP. Di RKP inilah pemerintah merencanakan kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan untuk mencapai target yang sudah ditentukan di RPJM.

Misalnya pencapaian Jalan Kondisi Mantap tahun 2014 hanya mencapai 61,31%. Panjang jalan milik Provinsi Banten diasumsikan 889,01 km. Atau Jalan Kondisi Mantap sepanjang 545,05 km.

Target Jalan Kondisi Mantap tahun 2015 adalah 92,15% atau 819,22 km. Siapa pun Gubernur Banten, maka pada tahun 2015, ia harus menganggarkan peningkatan jalan sepanjang 274,17 km. Dengan asumsi biaya peningkatan jalan per km-nya Rp2,5 miliar, maka tahun 2015 Pemprov Banten minimal harus menganggarkan dana sebesar Rp685,42 miliar. Ini di luar biaya pemeliharaan jalan yang sudah dalam kondisi mantap.

Lalu bagaimana kita mengetahui rencana-rencana pembangunan itu dilaksanakan? Atau Apakah pelaksanaan rencana-rencana pembangunan itu mencapai target atau tidak? Mencapai 100% seperti direncanakan atau tidak?

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pertama kali diperintahkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 7 tahun 1999. Tujuan LAKIP adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai prasyarat terbentuknya pemerintah yang baik dan bersih.

Inpres ini ditindak lanjuti Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang mengeluarkan Keputusan No 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menghindari manipulasi data di LAKIP, Kepala LAN kembali mengeluarkan Keputusan No 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Terakhir pedoman penyusunan LAKIP bagi pemerintah daerah mengacu pada Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) No 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 3 menyebutkan, Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota menyusun Dokumen Penetapan Kinerja tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, Dalam penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja agar memperhatikan:

a. Kontrak kinerja antara Presiden dengan Menteri
b. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
c. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan
d. Dokumen Penganggaran dan atau Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 10 ayat (1) menyebutkan, Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Ayat (2)-nya berbunyi, Pengukuran pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Dari keempat pasal itu, maka LAKIP adalah sistem pelaporan mandiri yang berisikan realisasi target-target indikator pembangunan, baik itu yang ada di RKP mau pun RPJM. Penetapan target tidak semena-mena atas kemauan pemimpin, tapi merupakan hasil kesepakatan antara pemimpin dan bawahannya.

Sehingga dapat disimpulkan, LAKIP adalah penilaian terhadap suatu pemerintah secara menyeluruh yang dilakukan secara mandiri dan berbasis kinerja.

Dengan LAKIP, kinerja instansi terkecil pun dapat dinilai. Karena LAKIP wajib bagi seluruh instansi pemerintah, mulai dari UPT, Badan, Kantor, Dinas, BLU, Biro, Pemkab, Pemkot, Pemprov, hingga kementerian.

Atas kemudahan mendapatkan data yang sudah terverifikasi dan tersedia secara menyeluruh inilah, kami memutuskan menggunakan LAKIP Provinsi Banten setiap tahunnya untuk menilai realisasi capaian target yang sudah ditentukan oleh RPJMD Provinsi Banten.

Semakin bagus penilaian LAKIP, maka semakin bagus kinerja sebuah pemerintahan. Semakin bagus kinerja sebuah pemerintahan, maka semakin bagus kinerja pemimpinnya.

Rentang Waktu

Kisah Gubernur Banten Atut Chosiyah tersandung hukum, lalu Wakil Gubernur Rano Karno otomatis naik jadi penguasa tunggal di Pemprov Banten bukanlah kisah baru.

Sebelumnya Atut menjadi Gubernur Banten, terlebih dahulu menjadi Wakil Gubernur. Saat itu Gubernur Banten-nya Djoko Munandar. Djoko tersandung kasus Korupsi Dana Perumahan sehingga harus di-non aktif-kan. Atut pun jadi Plt Gubernur Banten tahun 2005.

Dan di Pilgub Banten 2007, berpasangan dengan Masduki, Atut terpilih jadi Gubernur Banten untuk pertama kalinya.

Di Pilgub Banten 2012, Atut terpilih kembali sebagai Gubernur Banten berpasangan dengan Rano Karno. Desember 2013, Atut ditahan KPK atas kasus suap Hakim MK Akil Mochtar.

Sehingga rentang kekuasaan Atut Chosiyah di mulai dari akhir tahun 2005 hingga akhir tahun 2013. Atau sekitar 7 tahun lamanya.

Tentu rentang waktu kekuasaan Atut tidak sebanding dengan rentang kekuasaan Rano Karno. Rentang kekuasaan Rano baru dimulai tahun 2014. Data LAKIP Provinsi Banten tahun 2016 belum tersedia.

Sehingga tak adil rasanya membandingkan kekuasaan Atut selama 7 tahun dan kekuasaan Rano yang baru 2 tahun.

Sehingga kami memutuskan untuk mengambil rentang waktu kekuasaan yang sama. Yaitu 2 tahun untuk masing-masing di rentang tahun yang berdekatan.

Kami mengambil masa kekuasaan Atut pada tahun 2012 dan 2013. Yaitu Sedangkan masa kekuasaan Rano, kami ambil tahun 2014 dan tahun 2015.

Indikator Pembangunan

Alejandro Portes dalam tulisannya di American Journal of Sociology dengan judul On the Sociology of National Development: Theories and Issues, tahun 1976, mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Yaitu proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat ke arah yang diinginkan melalui kebijakan, strategi dan rencana.

Transformasi itu dapat dilihat dari perubahan-perubahan bidang yang sedang dibangun. Misalnya, pembangunan bidang

Industri dan Jasa dapat dilihat dari perubahan pertumbuhan produksi. Maka di bidang Industri dan Jasa, pertumbuhan produksi dijadikan indikator pembangunan.

Karena pembangunan yang dilaksanakan pemerintah itu mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, maka banyak indikator yang mesti dilihat.

RPJMD Provinsi Banten 2012-2017 memuat 243 indikator pembangunan. Ini belum termasuk 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan puluhan indikator APBD.

Dari 243 indikator itu, hanya 68 indikator yang berkaitan dengan Visi dan Misi Gubernur Banten Atut Chosiyah dan pasangannya Wakil Gubernur Banten Rano Karno.

Dari 68 indikator itu, 2 indikator tidak dapat kami sertakan. Indikator Tingkat Partisipasi Pemilih hanya terjadi 5 tahun sekali. Dan Indikator Opini Audit BPK berjenis keterangan, bukan numerik sehingga perbandingan menjadi menarik.

Perbandingan kinerja Atut Chosiyah dan Rano Karno, kami ambil dari 4 IKU dan 66 indikator yang berkaitan dengan Visi dan Misi mereka. Ketujuh puluh indikator itu sebagai berikut:

Indikator Makro (**IKU**)

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
3. Presentasi Penduduk Miskin
4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Misi I : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan

5. Tingkat Kemantapan Jalan
6. Tingkat Kemantapan Jembatan
7. Peningkatan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis
8. Rasio Elektrifikasi
9. Cakupan Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan

10. Cakupan Akses Pelayanan Sanitasi Dasar
11. Cakupan Pembinaan jasa Konstruksi
12. Tingkat Status Mutu Sungai Utama & Waduk Besar
13. Jumlah Hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik
14. Cakupan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah Industri
15. Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Banten
16. Luas Kawasan yang Terlindungi dari Dampak Banjir
17. Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun
18. Jumlah Penerapan Energi Alternatif

Misi II: Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

19. Indeks Gini
20. PDRB Per Kapita
21. Daya Beli Masyarakat
22. Pengeluaran Konsumsi Pangan Per Kapita Per Bulan
23. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan/Kapita Per Bulan
24. Pertumbuhan Sektor Pertanian
25. Pertumbuhan Sektor Peternakan
26. Pertumbuhan Sektor Perkebunan
27. Pertumbuhan Sektor Kehutanan
28. Pertumbuhan Sektor Pertambangan
29. Pertumbuhan Sektor Pariwisata
30. Pertumbuhan Sektor Perikanan
31. Pertumbuhan Sektor Perdagangan
32. Pertumbuhan Sektor Industri
33. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
34. Persentase Wirausaha Baru
35. Laju Pertumbuhan Investasi
36. Penguatan Cadangan Pangan Provinsi
37. Indeks Tanam (Padi)

Misi III: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI

38. Angka Melek Huruf
39. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
40. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
41. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
42. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
43. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
44. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
45. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C
46. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar
47. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah
48. Angka Harapan Hidup
49. Angka Kematian Bayi (1/1000 KH)
50. Angka Kematian Ibu (1/100.000 KH)
51. Cakupan Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat
52. Indeks Pembangunan Gender
53. Indeks Pemberdayaan Gender
54. Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan
55. Cakupan Pembinaan Cabang Olah Raga

Misi IV: Penguatan Semangat Kebersamaan Antar Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang

56. Cakupan Pelayanan PMKS
57. Jumlah Konflik Bernuansa SARA
58. Cakupan Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah
59. Laju Pertumbuhan Pendudukan
60. Jumlah Kerjasama (Kesepakatan) Pembangunan Daerah

Misi V: Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

61. Cakupan Tindak Lanjut LHP
62. Rasio Kemandirian Daerah
63. Skala Kepuasan Masyarakat (1-4)
64. Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah (1-7)
65. Cakupan Penyelesaian PERDA
66. Cakupan Penegakan PERDA
67. Angka Kriminalitas
68. Cakupan Mitigasi Kebencanaan
69. Tingkat Capaian Sasaran RPJMD
70. Indeks Demokrasi Indonesia

Ketiadaan Data

Hal yang mengejutkan adalah LAKIP tahun 2014 dan tahun 2015 tidak melaporkan semua indikator yang berkaitan dengan Visi dan Misi Gubernur terpilih.

Tahun 2014, tercatat ada 38 indikator yang tidak dilaporkan dalam LAKIP. Dan tahun 2015 meningkat menjadi 44 indikator tidak dilaporkan.

Banyak dalih dan pembenaran yang disodorkan saat kasak-kusuk mencari alasan dibalik tidak dimuatnya 44 indikator dalam LAKIP itu. Sedangkan mencari jawaban resmi tak kunjung datang jua.

Akhirnya, kami hanya menyimpulkan satu hal saja. Jika seseorang tidak melaporkan hasil pekerjaannya, maka hanya ada dua kemungkinan. Pertama pekerjaan itu tidak dikerjakan atau hasilnya demikian buruk sehingga malu untuk dilaporkan. Atau yang kedua, mereka tidak paham apa yang harus dikerjakan. Ini berarti mereka memang tidak pantas untuk duduk di posisi itu.

Sehingga untuk indikator-indikator yang tidak dilaporkan dalam LAKIP Banten itu, kami beri nilai kinerja 0%.

Metoda Penilaian

Permen PAN-RB No 29 Tahun 2010 Pasal 10 ayat (2) menyebutkan, Pengukuran pencapaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Hasilnya adalah capaian kinerja Pemerintah berbentuk presentasi. Sebetulnya, nilai kinerja pemerintah itu hanya satu. Dapat berupa angka presentasi, mau pun nilai abjad seperti A, B, C dan seterusnya.

Rumusnya masih sama sederhana, membandingkan target dan realisasi. Namun setiap indikator diberikan bobot yang berbeda.

Metoda penilaian kami tak serumit itu. Karena penilaian yang kami lakukan adalah membandingkan secara langsung kinerja Atut Chosiyah dan Rano Karno di 70 indikator dalam RPJMD Provinsi Banten 2012-2017, maka pembobotan indikator kami hilang.

Kinerja Atut di bidang IPM akan dibandingkan langsung dengan kinerja Rano di bidang yang sama. Lalu kinerja rata-rata dikelompokan dalam 1 kelompok makro dan 5 kelompok misi. Terakhir, tentu nilai tunggal rata-rata kinerja Atut berbanding kinerja Rano.

Ini Atut Itu Rano

Bulan April 2016, Plt Gubernur Banten Rano Karno membuat kejutan. Katanya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten meningkat signifikan dari posisi 23 menjadi posisi ke 8.

"Kalau bicara IPM, Banten itu nomor delapan sekarang. Sebelumnya di peringkat ke 23 dari 34 provinsi di Indonesia. Artinya, peningkatannya luar biasa secara nasional," kata Rano seperti dilansir Harian Radar Banten (16/4/2016).

Tentu saja ucapan Rano ini membuat geger orang-orang yang senang mengamati jalannya pemerintahan. Soalnya publikasi IPM biasanya dilakukan akhir tahun berikutnya. Jadi IPM 2015 akan diumumkan pada akhir tahun 2016.

Ternyata memang Badan Pusat Statistik (BPS) Banten belum mempublikasikan IPM Banten tahun 2015.

"Kami belum mengeluarkan angka IPM tahun 2015. Nanti per 1 Nopember 2016," kata Nurrizah, seksi Disnesis dan Statistik BPS Banten seperti dilansir mediabanten.com (1/5/2016).

Klaim keberhasilan terindikasi bohong beberapa kali dilakukan Rano Karno. Makin mendekati Pilgub Banten 2017, klaim keberhasilan terindikasi bohong ini semakin sering dilakukan.

Hal ini diperparah oleh para pendukung RK-Mulya. Bukan saja terindikasi bohong, mereka jelas-jelas menggunakan data yang tidak jelas asalnya. Tentu saja data itu berbeda dari data resmi yang dikeluarkan Pemprov Banten. Atau lembaga lainnya.

Misalnya saja gerakan Banten Bangkit yang melansir 4 poster digital keberhasilan Rano di media sosial. Salah satunya adalah keberhasilan Rano dalam meningkatan pendapatan Pajak Daerah.

Setelah dibandingkan dengan data-data resmi dari Pemprov Banten dan BPK Banten, ternyata data itu data palsu.

Poster digital Banten Bangkit menyebutkan, pendapatan Pajak Daerah Pemprov Banten tahun 2013 sebesar Rp6,23 triliun.

Sementara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten dan BPS Banten hanya menyebutkan Rp3,94 triliun saja.

Lebih parah lagi akun pendukung RK-Mulya yang mengaku bernama Relawan RK. Dalam statusnya, Relawan RK memberitahukan Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang sudah dimulai. Tak lupa Relawan RK juga memasang foto Jalan Tol dalam tahap akhir. Entah sebenarnya itu pembangunan Jalan Tol dimana.

Dalam buku ini, penilaian terhadap kinerja Atut Chosiyah dan Rano Karno tidak menggunakan data palsu, data yang tidak jelas asalnya, dan tentunya bukan data asal comot, seperti yang sering dilakukan RK-Mulya dan para pendukung.

Data yang digunakan dalam buku ini adalah data resmi yang dipublikasikan Pemprov Banten. Yaitu berupa data dari LAKIP Provinsi Banten tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015. Sebagai bahan pembanding, digunakan data RPJMD Provinsi Banten 2012-2017.

Perbandingan Atut dan Rano ini disajikan dalam 6 kelompok. Kelompok pertama adalah perbandingan kinerja di Indikator Makro. Kedua dan seterusnya, perbandingan kinerja di indikator-indikator yang dinyatakan dalam Misi I hingga V.

Kinerja Indikator Makro

Ada 4 indikator dalam kelompok ini. Kinerja Atut unggul di ke 4 indikator itu dibandingkan Rano. Rata-rata kinerja Atut di indikator makro adalah 101,81. Sementara Rano hanya berkinerja 88,28 saja.

Tabel Perbandingan Kinerja Indikator Makro

Atut Chosiyah	Indikator	Rano Karno
97,77	**IPM**	94,69
97,61	**LPE**	74,04
99,66	**Presentasi Penduduk Miskin**	87,11
112,18	**Angka TPT**	97,72
101,81	**Rata-Rata Kinerja**	**88,28**

Tabel Kinerja Indikator Makro Per Tahun

Atut Chosiyah		Indikator	Rano Karno	
2012	**2013**		**2014**	**2015**
97,72	97,82	**IPM**	94,42	94,07
105,08	90,15	**LPE**	77,65	70,44
103,50	95,80	**Presentasi Penduduk Miskin**	90,70	83,50
120,90	103,40	**Angka TPT**	98,70	96,80

Kinerja Misi I

Ada 14 indikator di Misi I yang menekankan pada kegiatan infrastruktur. Di Misi I ini, LAKIP di zaman Rano Karno, yaitu LAKIP tahun 2014 dan tahun 2015 ternyata tidak melaporkan semua indikator.

Tahun 2014 tercatat ada 7 indikator yang tidak dilaporkan. Yaitu indikator Cakupan Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan, Cakupan Akses Pelayanan Sanitasi Dasar, Cakupan Pembinaan Jasa Konstruksi, Tingkat Status Mutu Sungai utama dan Waduk Besar, Jumlah hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik, Cakupan Beban Pencemaran Air Limbah Industri dan Luas Kawasan Yang Terlindungi Dari Dampak Banjir.

Sedangkan tahun 2015, selain masih tidak melaporkan indikator yang sama di tahun 2014, Rano Karno juga tidak melaporkan Rasio Elektrifikasi. Sehingga di tahun 2015 ada 15 indikator yang tidak dilaporkan. Akibatnya, jelas membuat Kinerja Rano Karno jatuh terpuruk hingga 36,83.

Kinerja Atut sendiri jauh di atas Rano. Kinerja Atut di Misi I mencapai angka 98,94 dan unggul di segala indikator dibandingkan Rano. Atut unggul telak.

Tabel Perbandingan Kinerja Indikator Misi I

Atut Chosiyah	Indikator	Rano Karno
95,06	Tingkat Kemantapan Jalan	77,99
99,88	Tingkat Kemantapan Jembatan	89,84
106,98	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis	18,89
100,10	Rasio Elektrifikasi	54,46
107,64	Cakupan Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan	0,00
84,16	Cakupan Akses Pelayanan Sanitasi Dasar	0,00
100,00	Cakupan Pembinaan Jasa Konstruksi	0,00
90,00	Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar	0,00
97,50	Jumlah Hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik	0,00
97,988	Cakupan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah Industri	0,00
85,62	Capaian Luas Kawasan Hutan Lindung Terhadap Luas Wilayah Banten	80,95
104,98	Luas Kawasan Yang Terlindungi Dari Dampak Banjir	0,00
103,57	Rasio Rencana Kawasan yang Tersusun	100,00
111,73	Jumlah Penerapan Energi Alternatif	93,48
98,94	Rata-Rata Kinerja	36,83

Tabel Kinerja Indikator Misi I Per Tahun

Atut Chosiyah		Indikator	Rano Karno	
2012	2013		2014	2015
98,61	91,50	Tingkat Kemantapan Jalan	72,00	83,8
100,00	99,75	Tingkat Kemantapan Jembatan	84,21	95,47
100,12	113,84	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis	12,58	25,11
100,00	100,01	Rasio Elektrifikasi	108,93	0,00
99,96	115,30	Cakupan Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan	0,00	0,00
100,72	67,60	Cakupan Akses Pelayanan Sanitasi Dasar	0,00	0,00
100,00	100,00	Cakupan Pembinaan Jasa Konstruksi	0,00	0,00
100,00	80,00	Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar	0,00	0,00
100,00	95,00	Jumlah Hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik	0,00	0,00
100,00	96,00	Cakupan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah Industri	0,00	0,00
97,70	73,54	Capaian Luas Kawasan Hutan Lindung Terhadap Luas Wilayah Banten	80,95	80,95
100,36	109,60	Luas Kawasan Yang Terlindungi Dari Dampak Banjir	0,00	0,00
107,14	100,00	Rasio Rencana Kawasan yang Tersusun	100,00	100,00
117,81	105,66	Jumlah Penerapan Energi Alternatif	100,00	86,86

Kinerja Misi II

Di misi II, RPJMD lebih menekankan pada memperkecil jarak kesenjangan si kaya dan si miskin. Ada 3 indikator untuk mengamati itu; Indikator Pengeluaran Konsumsi Pangan Per Kapita Per Bulan, Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Per Bulan dan Indeks Gini.

Di Misi II ini, Rano lagi-lagi tidak melaporkan beberapa indikator. Baik untuk LAKIP tahun 2014 mau pun 2015, Rano tidak melaporkan 13 indikator; Indikator Daya Beli Masyarakat, seluruh indikator Pertumbuhan Sektor yang berjumlah 9 indikator, Persentasi Wirausaha Baru, Laju Pertumbuhan Investasi dan Indeks Tanam (padi).

Di Misi II ini, Rano unggul 3 indikator; PDRB Per Kapita, Pengeluaran Konsumsi Pangan Per Kapita Per Bulan dan Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Per bulan. Selebihnya (16 indikator) Atut jauh lebih unggul.

Rata-rata kinerja Atut Chosiyah untuk Misi II ini mencapai 98,96. Sedangkan Rano Karno hanya mencapai 32,58 saja. Atut kembali unggul telak terhadap Rano.

Tabel Perbandingan Kinerja Indikator Misi II

Atut Chosiyah	Indikator	Rano Karno
91,09	**Indeks Gini**	67,86
124,02	**PDRB Per Kapita**	153,12
100,06	**Daya Beli Masyarakat**	0,00
104,24	**Pengeluaran Konsumsi Pangan Per Kapita Per Bulan**	104,96
89,57	**Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Per bulan**	**104,29**
83,41	**Pertumbuhan Sektor Pertanian**	**0,00**
87,65	**Pertumbuhan Sektor Peternakan**	**0,00**
100,00	**Pertumbuhan Sektor Perkebunan**	**0,00**

100,00	**Pertumbuhan Sektor Kehutanan**	**0,00**
65,00	**Pertumbuhan Sektor Pertambangan**	**0,00**
72,83	**Pertumbuhan Sektor Pariwisata**	**0,00**
67,26	**Pertumbuhan Sektor Perikanan**	**0,00**
86,91	**Pertumbuhan Sektor Perdagangan**	**0,00**
69,60	**Pertumbuhan Sektor Industri**	**0,00**
90,09	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**	82,98
142,33	**Persentase Wirausaha Baru**	0,00
198,43	**Laju Pertumbuhanan Investasi**	0,00
106,01	**Penguatan Cadangan Pangan Provinsi**	105,82
101,72	**Indeks Tanam (Padi)**	0,00
98,96	**Rata-Rata Kinerja**	**32,58**

Tabel Kinerja Indikator Misi II Per Tahun

Atut Chosiyah		**Indikator**	**Rano Karno**	
2012	**2013**		**2014**	**2015**
105,30	76,90	**Indeks Gini**	85,71	50,00
151,00	97,05	**PDRB Per Kapita**	152,50	153,73
99,99	100,14	**Daya Beli Masyarakat**	0,00	0,00
102,01	106,47	**Pengeluaran Konsumsi Pangan Per Kapita Per Bulan**	105,68	104,24
92,86	86,27	**Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Per bulan**	101,79	106,79
100,00	66,82	**Pertumbuhan Sektor Pertanian**	0,00	0,00
100,00	75,30	**Pertumbuhan Sektor Peternakan**	0,00	0,00
100,00	100,00	**Pertumbuhan Sektor**	0,00	0,00

		Perkebunan		
100,00	100,00	Pertumbuhan Sektor Kehutanan	0,00	0,00
100,00	30,00	Pertumbuhan Sektor Pertambangan	0,00	0,00
100,00	45,66	Pertumbuhan Sektor Pariwisata	0,00	0,00
100,00	34,52	Pertumbuhan Sektor Perikanan	0,00	0,00
100,00	73,82	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	0,00	0,00
100,00	39,20	Pertumbuhan Sektor Industri	0,00	0,00
92,60	87,58	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	85,29	80,67
100,00	184,65	Persentase Wirausaha Baru	0,00	0,00
100,00	296,86	Laju Pertumbuhanan Investasi	0,00	0,00
100,00	112,03	Penguatan Cadangan Pangan Provinsi	83,12	128,53
100,00	103,43	Indeks Tanam (Padi)	0,00	0,00

Kinerja Misi III

Bidang yang paling penting bagi kualitas masyarakat Banten adalah Misi III ini. Karena Misi III memfokuskan pada dunia pendidikan dan kesehatan. Ada 18 indikator di bidang ini.

Di bidang ini, kembali Rano tidak melaporkan seluruh indikator. Tahun 2014, Rano tidak melaporkan 7 indikator; Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Cakupan Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan dan Cakupan Pembinaan Cabang Olah Raga.

Sedangkan tahun 2015 indikator yang tidak dilaporkan Rano bertambah 3 jadi 10 indikator; Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar, Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah dan Angka Melek Huruf.

Di bidang ini, Rano hanya mampu unggul 3 dari 18 indikator; Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C dan Angka Harapan Hidup. Sisanya 15 indikator dikuasai keunggulan Atut Chosiyah.

Kinerja Misi III masih unggul Atut Chosiyah yang mencatat skor 105,52 dibandingkan Rano yang hanya mencatat 53,69.

Tabel Perbandingan Kinerja Indikator Misi III

Atut Chosiyah	Indikator	Rano Karno
100,34	**Angka Melek Huruf**	50,71
92,19	**Angka Rata-Rata Lama Sekolah**	89,07
97,37	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A**	97,56
108,23	**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B**	106,21
109,81	**Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C**	111,97
94,41	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket C**	93,64
94,72	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B**	91,44
105,21	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C**	99,39
115,71	**Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar**	59,18
174,29	**Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah**	64,82
99,27	**Angka Harapan Hidup**	102,49
99,62	**Angka Kematian Bayi**	0,00
98,36	**Angka Kematian Ibu**	0,00
100,00	**Cakupan Tenaga Kerja yang**	0,00

	Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat	
97,76	**Indeks Pembangunan Gender**	0,00
111,85	**Indeks Pemberdayaan Gender**	0,00
100,00	**Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan**	0,00
100,00	**Cakupan Pembinaan Cabang Olah Raga**	0,00
105,52	**Rata-Rata Kinerja**	**53,69**

Tabel Kinerja Indikator Misi III Per Tahun

Atut Chosiyah		Indikator	Rano Karno	
2012	**2013**		**2014**	**2015**
100,53	100,16	**Angka Melek Huruf**	101,43	0,00
89,66	94,72	**Angka Rata-Rata Lama Sekolah**	89,12	89,02
94,85	99,89	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A**	97,43	97,68
100,50	115,96	**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B**	107,50	105,37
109,48	110,14	**Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C**	112,90	111,04
88,90	100,32	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket C**	92,86	94,41
88,62	100,82	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B**	90,16	92,73
112,57	97,84	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C**	104,39	94,40
115,83	115,60	**Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar**	118,36	0,00
115,09	233,49	**Angka Partisipasi**	129,65	0,00

		Sekolah Pendidikan Menengah		
100,53	98,02	**Angka Harapan Hidup**	102,72	102,25
100,97	98,26	**Angka Kematian Bayi**	0,00	0,00
104,86	91,85	**Angka Kematian Ibu**	0,00	0,00
100,00	100,00	**Cakupan Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat**	0,00	0,00
95,52	100,00	**Indeks Pembangunan Gender**	0,00	0,00
123,71	100,00	**Indeks Pemberdayaan Gender**	0,00	0,00
100,00	100,00	**Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan**	0,00	0,00
100,00	100,00	**Cakupan Pembinaan Cabang Olah Raga**	0,00	0,00

Kinerja Misi IV

Indikator di Misi IV hanya 5. Tapi Rano hanya melaporkan satu indikator saja; Laju Pertumbuhan Penduduk. 4 indikator sisanya tidak dilaporkan Rano.

Di Misi IV ini, Atut menang telak dengan skor 101,75 berbanding skor Rano 17,84. Terlihat sekali Rano tidak peduli dengan sinergitas antar pemerintah daerah di Provini Banten

Tabel Perbandingan Kinerja Indikator Misi IV

Atut Chosiyah	Indikator	Rano Karno
122,01	Cakupan Pelayanan PMKS	0,00
100,00	Jumlah Konflik Bernuansa SARA	0,00
100,00	Cakupan Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah	0,00
86,75	Laju Pertumbuhan Penduduk	89,18
100,00	Jumlah Kerjasama (Kesepakatan) Pembangunan Daerah	0,00
101,75	**Rata-Rata Kinerja**	**17,84**

Tabel Kinerja Indikator Misi IV Per Tahun

Atut Chosiyah		Indikator	Rano Karno	
2012	2013		2014	2015
100,00	144,02	Cakupan Pelayanan PMKS	0,00	0,00
100,00	100,00	Jumlah Konflik Bernuansa SARA	0,00	0,00
100,00	100,00	Cakupan Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah	0,00	0,00
86,27	87,22	Laju Pertumbuhan Penduduk	88,64	89,72
100,00	100,00	Jumlah Kerjasama (Kesepakatan) Pembangunan Daerah	0,00	0,00

Kinerja Misi V

Misi Kelima ini memang hanya memiliki 10 indikator. Tapi perannya sangat penting. Karena Misi ini bertujuan menjadikan Pemprov Banten sebagai Pemerintah yang Baik dan Bersih.

Entah dipahami atau tidak, Rano di tahun 2015 sama sekali tidak melaporkan satu indikator pun dalam LAKIP-nya. Di tahun 2014, hanya satu yang dilaporkan, yaitu angka kriminalitas. Skor kinerja Rano di Misi V sungguh memalukan, hanya mampu menyetak 1,85 saja.

Perbedaannya dengan kinerja Atut, sungguh luar biasa. Di Misi V Atut mencetak skor 100,57.

Tabel Perbandingan Kinerja Indikator Misi V

Atut Chosiyah	Indikator	Rano Karno
111,34	**Cakupan Tindak Lanjut LHP**	0,00
101,11	**Rasio Kemandirian Daerah**	0,00
100,00	**Skala Kepuasan Masyarakat**	0,00
100,00	**Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah**	0,00
88,88	**Cakupan Penyelesaian PERDA**	0,00
100,00	**Cakupan Penegakan PERDA**	0,00
80,26	**Angka Kriminalitas**	18,47
94,08	**Cakupan Mitigasi Kebencanaan**	0,00
130,00	**Tingkat Capaian RPJMD**	0,00
100,00	**Indeks Demokrasi Indonesia**	0,00
100,57	**Rata-Rata Kinerja**	**1,85**

Tabel Kinerja Indikator Misi V Per Tahun

Atut Chosiyah		Indikator	Rano Karno	
2012	2013		2014	2015
100,00	122,68	Cakupan Tindak Lanjut LHP	0,00	0,00
100,00	102,22	Rasio Kemandirian Daerah	0,00	0,00
100,00	100,00	Skala Kepuasan Masyarakat	0,00	0,00
100,00	100,00	Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah	0,00	0,00
100,00	77,76	Cakupan Penyelesaian PERDA	0,00	0,00
100,00	100,00	Cakupan Penegakan PERDA	0,00	0,00
60,53	100,00	Angka Kriminalitas	36,93	0,00
100,00	88,15	Cakupan Mitigasi Kebencaan	0,00	0,00
160,00	100,00	Tingkat Capaian RPJMD	0,00	0,00
100,00	100,00	Indeks Demokrasi Indonesia	0,00	0,00

Betul Banten Terpuruk Karena Dipimpin Rano

Dari uraian di bagian “Ini Atut Itu Rano” tergambar jelas mana kinerjanya yang lebih baik. Atut menang di Indikator Makro. Atut menang di Indikator Misi I. Atut menang di Indikator Misi II. Atut menang di Indikator Misi III. Atut menang di Indikator Misi IV. Dan Atut menang di Indikator Misi V.

Sedangkan dari 70 indikator yang dibandingkan, Rano hanya unggul di 7 indikator. Sisanya 63 indikator dimenangkan Atut Chosiyah. Atut unggul sangat telak sekali terhadap Rano Karno.

Secara keseluruhan, kinerja Atut Chosiyah selama tahun 2012 dan 2013 mendapat penilaian 101,26. Sedangkan kinerja Rano Karno selama tahun 2014 dan 2015 hanya mendapat penilaian 38,51. Hampir 3 x lebih rendah dari Atut Chosiyah.

Maka dapat disimpulkan, “mana yang lebih baik Atut Chosiyah atau Rano Karno?”. Di era siapa Banten terpuruk?

Tabel Perbandingan Indikator Makro dan Semua Misi

Indikator	Atut Chosiyah	Rano Karno	Keterangan
Makro	101,81	88,28	Atut Unggul
Misi I	98,94	36,83	Atut Unggul
Misi II	98,96	32,58	Atut Unggul
Misi III	105,52	53,69	Atut Unggul
Misi IV	101,75	17,84	Atut Unggul
Misi V	100,57	1,85	Atut Unggul
Rata-Rata	**101,26**	**38,51**	**Atut Unggul**

Daftar Pustaka

Pemerintah Provinsi Banten, "Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten Tahun 2012", Pemerintah Provinsi Banten, Kota Serang, 2013, (http://bantenprov.go.id/upload/Pengumuman/LAKIP%20PROV%20BANTEN%202012.pdf), diakses terakhir kali tanggal 1 Pebruari 2017

Pemerintah Provinsi Banten, "Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten Tahun 2013", Pemerintah Provinsi Banten, Kota Serang, 2014, (http://bantenprov.go.id/upload/PPID/02_Informasi_Berkala/2.%20KEGIATAN%20DAN%20KINERJA/LAKIP%20PEMPROV%20BANTEN%20TAHUN%202013.pdf), diakses terakhir kali tanggal 1 Pebruari 2017

Pemerintah Provinsi Banten, "Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten Tahun 2014", Pemerintah Provinsi Banten, Kota Serang, 2015, (http://bantenprov.go.id/upload/PPID/02_Informasi_Berkala/2.%20KEGIATAN%20DAN%20KINERJA/Lakip%202014.pdf), diakses terakhir kali tanggal 1 Pebruari 2017

Pemerintah Provinsi Banten, "Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten Tahun 2015", Pemerintah Provinsi Banten, Kota Serang, 2016, (http://bantenprov.go.id/upload/PPID/02_Informasi_Berkala/2.%20KEGIATAN%20DAN%20KINERJA/lakip2015full.pdf), diakses terakhir kali tanggal 1 Pebruari 2017

Pemerintah Provinsi Banten, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2012-2017", Provinsi Banten, Kota Serang, 2013, (http://bantenprov.go.id/upload/PPID/03_Informasi_Setiap_Saat/Renstra%20Renja/Perda%20No.%204%20Thn%202012%20RPJMD%202012%20-%202017.pdf), diakses terakhir kali tanggal 1 Pebruari 2017

Sigit; Aditya, "Gubernur Rano: Kinerja Pemprov Tak Seburuk Yang Dikira", www.radarbanten.co.id, Kota Serang, 2016, (http://www.radarbanten.co.id/gubernur-rano-kinerja-pemprov-tak-seburuk-yang-dikira/), diakses terakhir kali tanggal 1 Pebruari 2017

Ucu Nur Arief Jauhar, "IPM Baru Dirilis Nopember, Rano Bilang Peringkatnya Naik", www.mediabanten.com, Kota Serang, 2016, (http://mediabanten.com/content/ipm-baru-dirilis-nopember-rano-bilang-peringkatnya-naik), diakses terakhir kali tanggal 20 Agustus 2016

Kementerian PAN-RB, "Permen PAN-RB No 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah", KemenPAN-RB, Jakarta, 2010, (http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Permenpan29-2010Kinerja.pdf), diakses terkahir kali tanggal 1 Pebruari 2017

Tim Penyusun
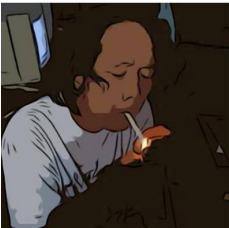
Ucu Nur Arief Jauhar

Lahir di Serang dari bapak asal Pandeglang dan ibu asal Rangkasbitung. Tak pernah mau mengaku pendidikan terakhirnya. Jika ditanya, selalu menjawab, "Daku Cuma punya ijazah TK di rumah". Ucu adalah orang yang pertama kali memperkenalkan profesi baru. Dan mungkin hanya satu-satunya di dunia, yaitu profesi Pengangguran Profesional.

Ibnoe Rachman

Lahir tahun 1990 di Kota Serang. Saat ini menjabat Ketua KNPI Kabupaten Serang. Ibnoe satu-satunya tim penyusun yang mempunyai hubungan darah dengan Atut Chosiyah. Ia adik sepupunya Atut.

Hasbulloh

Asli orang Petir. Sebuah kampung di perbatasan Serang-Lebak. Petir terkenal sebagai penghasil politikus dan aktivis anti korupsi bagi Serang. Hasbulloh adalah Ketua LSM Rakyat Banten yang sering mengkritis Pemprov Banten.

Mathori

Orang Pontang ini bukan aktivis. Apalagi politikus. Profesi sehari-hari Mathori adalah pelaksana dari pihak ketiga yang memenangkan proyek-proyek APBD. Tapi sikap kritis dan pengetahuannya akan seluk beluk di pemerintah, menjadi kawan diskusi yang enak saat membicarakan pemerintahan. Terutama Pemprov Banten.